

# Consumption Patterns and Distribution of Household Income Recipients of PKH (Program Keluarga Harapan) in Jiken Village, Jiken District, Blora District

Deva Damayanti Mulyono <sup>1</sup>, Muhammad Arif<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Department of Economic and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 [devadamayanti47@gmail.com](mailto:devadamayanti47@gmail.com)

## ***Abstract***

*The purpose of this study was to determine the consumption pattern and income distribution of PKH beneficiaries in Jiken Village, Jiken District, Blora District. The research method used is descriptive qualitative, with a research focus on household consumption patterns. The number of samples is 72 housewives who receive PKH. Methods of data collection is done by interview, observation, and documentation. The data analysis technique was carried out using the Gini coefficient to calculate the inequality of income distribution. The resource persons are dominated by housewives with an age range of 40-50 and low education. The results showed that the pattern of household consumption was divided into food and non-food consumption, non-food consumption was higher. The highest non-food consumption is the allocation of income to buy cigarettes. Income distribution is included in the category of low inequality. The PKH program really helps the household economy and the presence of PKH assistants has a very high impact on the distribution of aid and suppresses social jealousy. A good poverty alleviation program is that poverty data is mature, there is a commitment between the facilitator and recipient of assistance to tell the real condition.*

***Keywords:*** Consumption patterns; Poverty; PKH [Century 10 pt, italic]

## **Pola Konsumsi Dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) Di Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola konsumsi dan distribusi pendapatan penerima bantuan PKH di Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian pada pola konsumsi rumah tangga. Jumlah sampel adalah 72 penerima PKH. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan koefisien gini untuk menghitung ketimpangan distribusi pendapatan. Narasumber didominasi oleh ibu rumah tangga dengan rentang usia 40-50 dan berpendidikan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konsumsi rumah tangga terbagi menjadi konsumsi pangan dan non pangan, konsumsi non pangan lebih tinggi. Konsumsi non pangan tertinggi adalah alokasi pendapatan untuk membeli rokok. Distribusi pendapatan termasuk dalam kategori ketimpangan yang rendah. Program PKH sangat membantu perekonomian rumah tangga dan adanya pendamping PKH sangat berpengaruh tinggi terhadap pendistribusian bantuan serta menekan kecemburuan sosial. Program penanggulangan kemiskinan yang baik adalah data kemiskinan sudah matang, ada komitmen antara fasilitator dan penerima bantuan untuk mengatakan kondisi yang sesungguhnya.

***Kata kunci:*** Pola Konsumsi; Kemiskinan; PKH

## 1. Pendahuluan

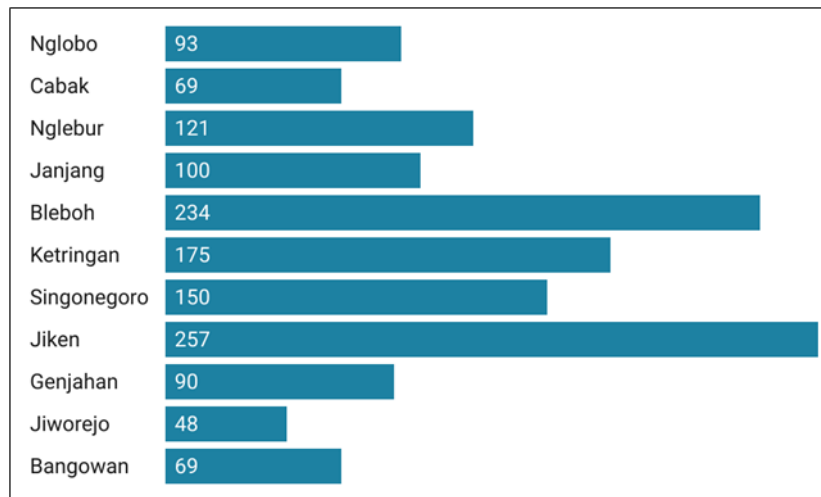
Kemiskinan merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi perhatian khusus di negara manapun, terlebih utama bagi negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara atau juga kondisi global. Suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan pendapatan per kapitanya rendah, pertumbuhan tingkat penduduk yang tinggi, sebagian besar tenaga kerja bergerak di bidang pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Menurut Reza Attaburrobbi (2013) kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan, baik uang maupun barang untuk kelangsungan hidup. Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling sulit dan rumit, karena kemiskinan mendatangkan gangguan bagi kehidupan bermasyarakat. Banyak masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, misalnya pencurian dan perampokan. Masalah-masalah sosial yang timbul dari efek kemiskinan sangat meresahkan masyarakat. Menyebabkan ada rasa tidak nyaman apabila hidup berdampingan dengan orang yang mempunyai masalah sosial kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora pada tahun 2021 sebanyak 107,05 ribu penduduk dengan garis kemiskinan sebesar Rp 363.649. Jumlah ini meningkat 0,46% atau setara dengan 3,32 ribu penduduk dari tahun sebelumnya. Selaras dengan presentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blora tahun ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blora tahun 2021 sebesar 1,82 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,40. Masing-masing meningkat 0,43 dan 0,19 dari tahun 2020. Bahkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P1), Blora termasuk kabupaten dengan lonjakan tertinggi di Jawa Tengah. Lonjakan Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Blora sama dengan Kabupaten Grobogan, yaitu sebesar 0,19.

Restu Achmaliadi dalam buku Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat (2010) mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan dan sekaligus menyebabkan hal-hal yang multidimensi, dari hal-hal yang sifatnya ideologis sampai dengan hal-hal yang sifatnya sangat teknis spesifik. Karena itu, menilai dan memecahkan kompleksitas kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi. Berbagai teori dan program pengentasan kemiskinan telah bermunculan, ternyata hampir mustahil menemukan teori dan teknik pengentasan kemiskinan yang universal. Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang sangat rumit. Mendefinisikan konsep kemiskinan agar bisa dipergunakan secara luas, misalnya untuk keperluan membuat kebijakan bukanlah hal yang mudah. Pada umumnya, dalam kenyataan di lapangan, sangatlah sulit menarik garis jelas yang memisahkan mereka yang miskin dan mereka yang tidak miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI (BPS, 2020).

**Grafik 1.** Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Jiken (Oktober-November 2021)



Sumber: Koordinator PKH Kecamatan Jiken

Penelitian ini dilakukan di Desa Jiken, karena Jiken adalah desa dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tertinggi di Kecamatan Jiken. Padahal Desa Jiken merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kecamatan Jiken. Tingginya jumlah penerima manfaat PKH, berarti masih banyak rumah tangga miskin di Desa Jiken. Menurut BPS, Dalam menghitung kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola konsumsi keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Jiken. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola konsumsi dan distribusi pendapatan keluarga penerima bantuan PKH di Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.

## 2. Metode

### 2.1 Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pola konsumsi dan karakteristik ekonomi KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan informan sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang tersedia oleh BPS atau dari Koordinator PKH Kecamatan Jiken.

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diawali dengan observasi, kemudian data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu ibu rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Data-data yang diharapkan dari wawancara tak berstruktur tersebut yaitu data tentang pola konsumsi, pendapatan keluarga, dan karakteristik ekonomi KPM PKH. penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi yaitu 96.711 masyarakat kecamatan Medan perjuangan

e: Persentase ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%

$$\begin{aligned} & \frac{257}{1 + 257 (0.1)^2} \\ = & \frac{257}{1 + 257 (0.01)} \\ = & \frac{257}{1 + 2.57} \\ = & \frac{257}{3.57} \\ = & 71.99 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan populasi 257, maka yang akan menjadi sampel dari penelitian di Desa Jiken adalah sebesar 71.99 yang dibulatkan menjadi 72 sampel.

### 2.3 Metode Analisis

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pendapatan dan pengeluaran masyarakat menggunakan rasio gini. Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Ratio Gini adalah:

$$GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi-1]$$

Keterangan:

fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.

Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.

Nilai gini antara 0 – 1. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna. Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna.

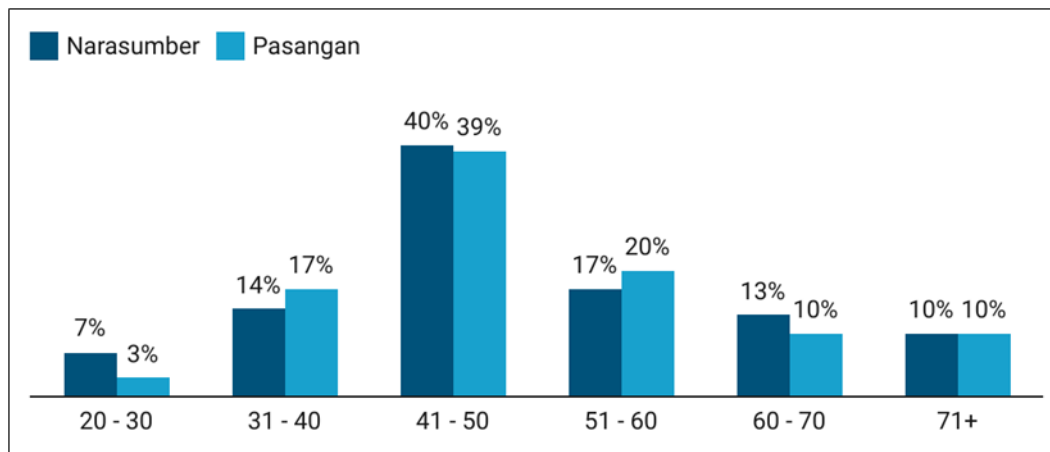
**Tabel 1.** Nilai Koefien Gini

Nilai Ratio Gini	Distribusi Pendapatan
0 < x < 0,40	Tingkat ketimpangan/ketidakmerataan rendah
0,40 < x < 0,50	Tingkat ketidakmerataan sedang
0,50 < x < 1	Tingkat ketidakmerataan tinggi

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Karakteristik KPM PKH Desa Jiken

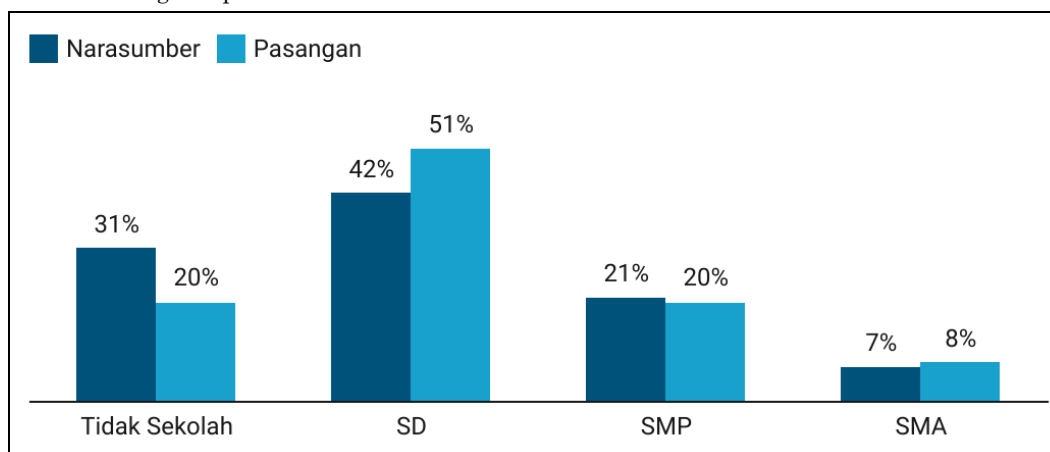
**Grafik 2.** Pengelompokan Usia KPM PKH Desa Jiken



Sumber: Data Primer, (diolah)

Narasumber didominasi oleh ibu rumah tangga dengan rentang usia 40 – 50 tahun. Dilanjut dengan narasumber dengan rentang usia 51 – 60 tahun. Pengelompokan usia responden hampir sama dengan usia suami meraka. Usia pasanganpun didominasi oleh rentang usia 41 tahun sampai 50 tahun. Responden dan pasangan sebagian besar adalah masyarakat dengan usia produktif. Terdapat 13 narasumber yang tidak mempunyai pasangan. 5 diantaranya berusia diatas 60 tahun. Sedangkan ada 4 ibu yang menjadi orang tua tunggal dan otomatis menjadi tulang punggung keluarga. Mereka harus bisa membagi waktu antara bekerja dan melakukan peran ganda. Semua mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan lebih dari Rp 1.000.000. Bahkan ada 2 orang yang bekerja didua tempat supaya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.

**Grafik 3.** Pengelompokan Pendidikan KPM PKH Desa Jiken



Sumber: Data Primer, (diolah)

Pendidikan yang rendah sering dikaitkan sebagai faktor penyebab kemiskinan. Pendidikan narasumber dan pasangan didominasi oleh masyarakat dengan pendidikan rendah yaitu lulusan SD dan mereka yang tidak pernah bersekolah sama sekali atau pernah sekolah namun tidak sampai tuntas. Dengan alasan yang hampir serupa antara tidak memiliki biaya, banyaknya tanggungan keluarga, memilih untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, atau tuntutan untuk segera menikah menjadi latar belakang tidak melanjutkan sekolah. Bisa dikatakan bahwa faktor pendidikan rendah yang menyebabkan kemiskinan, juga disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri.

Program-program penanggulangan kemiskinan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan untuk pendistribusian bantuan. DTKS memuat 40% masyarakat dengan kesejahteraan sosial terendah. DTKS terbagi menjadi 4 kategori yaitu (1) Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok kondisi 10% terendah (sangat miskin); (2) Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok kondisi 10-20% terendah (miskin); (3) Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok kondisi 20-30% terendah (hampir miskin); (4) Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok kondisi 30-40% terendah (rentan miskin). KPM PKH Desa Jiken didominasi oleh rumah tangga yang berada pada tingkat kesejahteraan 11% - 20% atau berada pada desil 2. Presentase rumah tangga yang berada pada desil 2 sebesar 43%. Sedangkan presentase rumah tangga yang berada didesil 1 sama dengan rumah tangga desil 3 sebesar 26%. Sisanya berada rumah tangga kategori desil 4, sebesar 4%.

### 3.2 Pola Konsumsi KPM PKH Desa Jiken

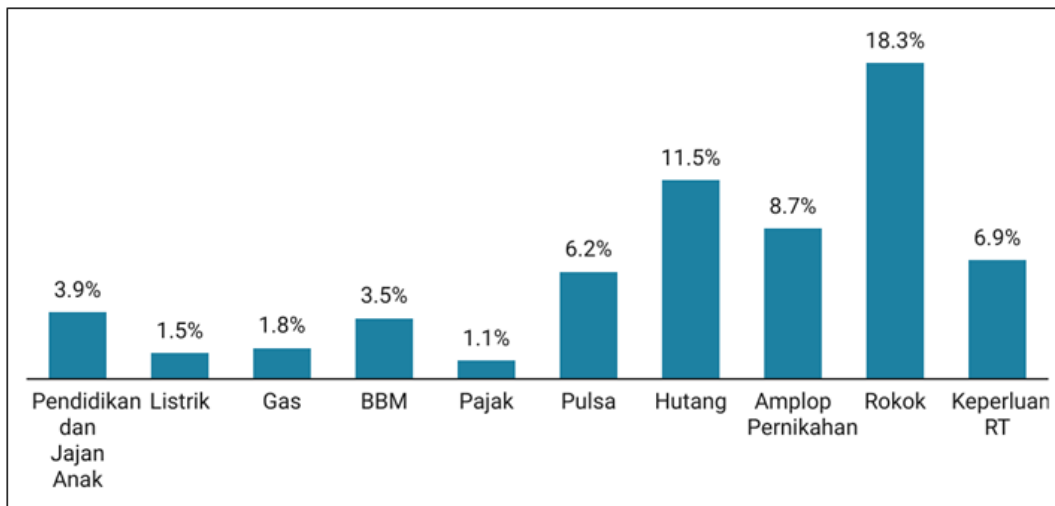
Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, KPM PKH tidak terlepas dari aktivitas ekonomi salah satunya mengkonsumsi barang dan jasa. Rumah tangga membutuhkan berbagai komoditi baik makanan maupun non makanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun, karena pendapatan rendah mereka lebih memilih berbelanja dipedagang keliling daripada pasar tradisional. Menurut Ibu Sulikah selaku ibu rumah tangga penerima PKH mengatakan bahwa:

*“Belanja dipedagang keliling lebih hemat. Bisa beli cabe seribu, bawang seribu, kalau dipasar tidak akan dilayani. Terkadang harga dipedagang keliling lebih murah daripada di pasar. Selain hemat juga lengkap, sudah ada minyak goreng, tepung, gula dengan kemasan kecil. Jadi bawa uang lima belas ribu sudah dapat lengkap untuk makan sehari.”*

Pendapatan rumah tangga dialokasikan lebih tinggi untuk konsumsi non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga 37% untuk konsumsi makanan dan 63% untuk konsumsi non makanan. Karena 88% KPM PKH adalah petani, jadi tidak ada anggaran untuk membeli beras. Lahan sawah atau tegal juga bisa ditanami cabe atau sayuran untuk menekan belanja pangan rumah tangga. Selain itu, ada 94% KPM PKH juga menerima bantuan sosial pangan yang cair setiap bulan. Pola ibu rumah tangga dalam menyediakan makanan untuk anggota keluarga hampir serupa, Ibu Suwanti mengatakan bahwa:

*“Kalau musim labu atau labu murah, setiap hari masak sayur labu. Entah itu disayur kuah atau tumis. Begitu pula kalau sawi murah, setiap hari masak sawi.”*

**Grafik 3.** Komposisi Pengeluaran Non Makan KPM PKH Desa Jiken

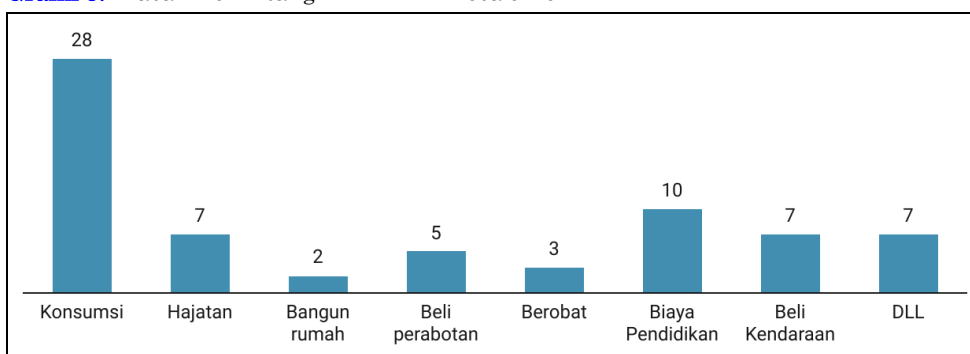


Sumber: Data Primer, (diolah)

Dana PKH yang cair setiap 3 bulan sekali digunakan masyarakat lebih banyak untuk kebutuhan non makanan seperti membayar hutang dan membeli perabotan. Apabila sedang musim hajatan, maka masyarakat harus bisa menekan kebutuhan lain untuk menghadiri undangan tetangga atau saudara. Pada grafik 2 menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan tertinggi ada pada pengeluaran untuk konsumsi rokok, pengeluaran ini ada setiap bulan dengan jumlah yang sama. Pengeluaran lain yang tergolong besar keperluan rumah tangga dan alokasi untuk membeli kuota atau pulsa. Sedangkan alokasi untuk amplop pernikahan hanya dibulan-bulan tertentu. Anggaran yang dikeluarkan untuk hajatan juga dianggap tabungan oleh sebagian masyarakat.

Sejumlah 65% KPM PKH mempunyai hutang, sedangkan sisanya mengaku tidak memiliki hutang atau cicilan sama sekali. Dengan alasan yang berbeda-beda, namun didominasi oleh masyarakat yang berhutang untuk konsumsi. Sebagian besar masyarakat

**Grafik 3.** Alasan Berhutang KPM PKH Desa Jiken



Sumber: Data Primer, (diolah)

yang mengaku memiliki utang, memilih untuk berhutang ke tetangga, saudara atau teman karena biasanya tanpa agunan dan tidak dibebani oleh utang. Namun ada beberapa yang meminta jaminan atas utang piutang. Sedangkan masyarakat yang memilih berhutang ke bank pasar karena mengaku sudah tidak ada jalan keluar. Berhutang di bank pasar atau sering disebut "mbatak" hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. Setelah itu, beban bunga yang sangat besar justru menambah masalah baru. Jika dana yang diperlukan dalam jumlah yang besar, mereka memilih untuk mengajukan dana di Bank Nasional atau Lembaga Keuangan Non Bank. Ada 8 KPM PKH yang mengaku memiliki



utang di Bank Nasional dan 9 KPM PKH yang berhutang di Lembaga Keuangan Non Bank. Sisanya memilih utang ke juragan, masyarakat menyebutnya dengan “bon”.

### 3.3 Distribusi Pendapatan KPM PKH Desa Jiken

Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Indeks gini pendekatan pendapatan

**Tabel 1.** Indeks Gini

Indeks Gini Pendekatan Pendapatan	0,171
Indeks Gini Pendekatan Pengeluaran	0,195

Sumber: Data Primer, (diolah)

menggunakan data jumlah pendapatan rumah tangga responden. Data ini merupakan akumulasi pendapatan rumah tangga dan jumlah bantuan sosial yang diterima setiap rumah tangga. Ketimpangan distribusi pendapatan KPM PKH Desa Jiken termasuk kategori ketimpangan rendah. Keluarga Ibu Fitria (27 tahun) adalah KPM PKH dengan pendapatan tertinggi sebesar Rp 2.775.000. Hampir semua anggota keluarga bekerja untuk biaya pengobatan anak.

Tanpa menghitung dengan detail, pendapatan antar KPM PKH tidak ada yang menonjol. Begitupula dengan gaya hidup. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pendistribusian bantuan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat miskin, terutama bantuan non tunai atau BNPT yang menyebabkan kecemburuan sosial. Ada beberapa masyarakat yang dianggap tidak layak menerima bantuan berupa sembako namun tetap mendapatkannya. Sebaliknya ada masyarakat yang menganggap dirinya layak mendapatkan bantuan, namun tidak pernah menerimanya. Permasalahan ini bisa terjadi dimanapun, entah itu berupa fakta atau ketidakobjektifan menilai tetangga. Selain itu, bagi mereka yang berprofesi sebagai petani merasa kesulitan dalam memperoleh pupuk subsidi padahal tergabung dalam kelompok tani.

Dari kejadian sebaiknya sebelum mendistribusikan bantuan, harus ada data yang akurat untuk menekan timbulnya bantuan yang salah sasaran. Selain itu, berkaca dari Program Keluarga Harapan yang mempunyai pendamping untuk memfasilitasi penerima bantuan, sebaiknya ada orang yang menguasai lapangan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Namun, kedua hal tersebut bisa menjadi sia-sia apabila penerima bantuan dan fasilitator tidak mempunyai komitmen yang baik. Keterbukaan terhadap keadaan yang sebenarnya dari kedua belah pihak menjadi faktor utama suksesnya program penanggulangan kemiskinan.

## 4. Kesimpulan

Dari paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Karakteristik keluarga miskin adalah mereka yang berpendidikan rendah dan berprofesi sebagai petani yang berasal dari keluarga yang berlatarbelakang serupa. Untuk menekan lahirnya keluarga miskin yang baru. sebaiknya ada program lain seperti pelatihan untuk mengembangkan kemampuan yang difokuskan untuk keluarga miskin.
2. Pengalokasian pendapatan non pangan terfokus pada anggaran untuk membeli rokok dan membayar utang. Harus ada aksi dari masyarakat untuk mengurangi konsumsi rokok, mungkin perekonomian rumah tangga akan jauh lebih baik dan beban keluarga berkurang.



3. Seperti yang diungkapkan oleh Restu Achmaliadi, hampir mustahil menemukan teori dan teknik pengentasan kemiskinan yang universal. Selain data yang akurat dan komitmen yang baik, hal yang harus diketahui adalah fakta-fakta yang ada di masyarakat. Namun, sebelum sebelum mengungkap apa yang ada dan terjadi, dibutuhkan tokoh masyarakat yang dapat dipercaya dan menguasai lapangan.

### Referensi

- [1] Y. Hamid and B. Setiawan, "ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur) (ANALYSIS OF HOUSEHOLD FOOD CONSUMPTION (CASE STUDY IN TARAKAN BARAT SUB DISTRICT TARAKAN CITY EAST BORNEO PROVINCE)," *Bulan Agustus*, no. 3, 2013.
- [2] F. Prasetyoningrum, E. Siti Rahayu, and S. Marwanti, "ANALISIS POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA PETANI JAGUNG DI KABUPATEN GROBOGAN ANALYSIS OF CONSUMPTION PATTERN OF CORN FARMER HOUSEHOLD AT GROBOGAN REGENCY," 2016.
- [3] Y. Hamid and B. Setiawan, "ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur) (ANALYSIS OF HOUSEHOLD FOOD CONSUMPTION (CASE STUDY IN TARAKAN BARAT SUB DISTRICT TARAKAN CITY EAST BORNEO PROVINCE)," *Bulan Agustus*, no. 3, 2013.
- [4] A. Rivai, B. M. Sinaga, H. Siregar, and H. Harianto, "Karakteristik Rumahtangga Petani Usaha Padi Penerima PKH di Kabupaten Karawang, Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 123–132, Jan. 2020, doi: 10.21776/ub.jepa.2020.004.01.12.
- [5] W. N. Imama and H. Yulistiyono, "Pola Perilaku Konsumsi Keluarga Penerima Manfaat Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan," *JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS*, vol. 5, no. 2, pp. 221–232, Oct. 2020, doi: 10.29407/nusamba.v5i2.14899.
- [6] Restu. Achmaliadi and Aliansi Masyarakat Adat Nusantara., *Memahami dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat adat*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2010.
- [7] N. Taufiq, E. Pratiwi, and A. Fatmawati, "KEMISKINAN MAKRO INDONESIA," 2020.
- [8] B. Pudjianto and M. Syawie, "KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA POVERTY AND HUMAN DEVELOPMENT," 2015.
- [9] T. Kalalo *et al.*, "ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA," 2016.
- [10] R. A. Fahmi Ginanjar *et al.*, "ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN," vol. 8, no. 2, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- [11] R. Attabiurrobby Annur and U. Negeri Semarang, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKOLA DAN

- MEJOB0 KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012,” Dipublikasikan, Semarang, 2013. [Online]. Available: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- [12] D. Solihin, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Yayasan Empat Sembilan Indonesia, 2014.
- [13] N. Prawoto, F. Ekonomi, U. Muhammadiyah, Y. Jalan, and L. Selatan, “MEMAHAMI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA,” 2009.
- [14] R. A. Fahmi Ginanjar *et al.*, “ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN,” vol. 8, no. 2, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- [15] Badan Pusat Statitiska Kabupaten Blora, “Indeks Kedalaman Kemiskinan 2021,” 2021.
- [16] Badan Pusat Statitiska Kabupaten Blora, “Indeks Keparahan Kemiskinan 2021,” 2021.
- [17] Badan Pusat Statitiska Jawa Tengah, “Garis Kemiskinan Kabupaten di Jawa Tengah,” 2021.